

# 2025



Nomor : 14.12/RIS/V/2025



## RISALAH RAPAT PARIPURNA

Senin, 19 Mei 2025

1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ipda Tut Harsono No. 43 TELP. (0274) 540645-540650 Fax. (0274) 540651 Yogyakarta 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Senin, 19 Mei 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;  
2. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;  
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.
- Waktu Undangan : 12.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 12.30 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

### Pimpinan Rapat :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Tidak Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.         | Hadir       |
| 3. Triyono Hari Kuncoro                | Hadir       |

### Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pimpinan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Wartawan.

---

---

### Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**HARI SENIN, TANGGAL 19, BULAN MEI, TAHUN 2025**

**DENGAN ACARA :**

1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.



Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin, 19 Mei 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda pertama rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna Hari Senin tanggal 5 Mei 2025 yang lalu.

Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Menugaskan kepada Saudara Susanto Dwi Antoro, S.E., Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra  
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Menugaskan kepada Saudara Nurcahyo Nugroho, Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar  
Menugaskan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional  
Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md, Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn, Urutan ke-6
7. Fraksi Partai Nasdem  
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan, Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.



Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Susanto Dwi Antoro, S.E., Juru Bicara Fraksi Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

**-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan --**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Susanto Dwi Antoro, S.E., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Gerindra -----**

**TAMBAHAN SISIPAN ORASI**

Sebelum kami akhiri pandangan Umum Fraksi Gerindra Kota Yogyakarta, perlu kami sampaikan kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam kaitannya penataan kawasan sumbu filosofi, terutama dalam hal ini adalah TKP Abubakar Ali. Kami mohon kebesaran hati Pemerintah Kota Yogyakarta, dimana warga Abu Bakar Ali sudah tersedia menerima opsi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk direlokasi sementara di wilayah Kotabaru dan nantinya mohon direalisasikan lokasi utama di TKP Giwangan. Sehingga perekonomian warga Kota Yogyakarta masih bisa tetap terjaga. Dari data yang kami kumpulkan, 202 warga Kota Yogyakarta konstituen kita, terutama di Danurejan ada 60 sekian, Jetis 50 dan sekitar 20 di Gedongtengen. Ini mohon menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta, karena kita semua adalah pejabat publik yang bertanggung jawab tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau partai politik pengusung kita, tapi juga bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih kita. Kita bukan mewakili lembaga privat apapun kita mewakili aspirasi warga Kota Yogyakarta. Sehingga kami mohon proses relokasi ini bisa berjalan dengan baik, demi kesejahteraan warga Kota Yogyakarta. Itu tambahan dari saya.

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Nurcahyo Nugroho disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Nurcahyo Nugroho, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Golkar -----**



Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas raperda tersebut.

Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.

Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Agenda kedua Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini Penyampaian penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

**--- Penjelasan Wali Kota Yogyakarta ---**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasan atas raperda dimaksud



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Untuk menindaklanjuti penjelasan atas raperda tersebut maka DPRD Kota Yogyakarta akan membentuk Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.

Untuk itu sebelumnya, akan dibacakan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.

Untuk itu Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan rancangan keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

#### ----- PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan Keputusan DPRD tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD tersebut, selanjutnya kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

**Jawab : Setuju.**

- **Ketok Palu 1 (Satu) kali. (X)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami silahkan kepada Plt. Sekretaris DPRD, untuk memberikan nomor bagi Keputusan DPRD dimaksud!

#### **Plt. SEKRETARIS DPRD**

**Jawab :**

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 diberi **Nomor 13/ KEP/DPRD/V/2025.**

Terimakasih

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Acara berikutnya adalah penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut. Selanjutnya untuk ketertiban proses pelaksanaan penandatanganan, kami silahkan Pembawa Acara Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

#### **PEMBAWA ACARA :**

Terimakasih.

Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.



Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk menempatkan diri, kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

**----- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD -----**

Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk kembali ke tempat.

Rangkaian acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

**PIMPINAN RAPAT :**

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa setelah pembentukan pansus pada rapat paripurna hari ini, mohon kepada Panitia Khusus untuk melaksanakan rapat internal guna menindaklanjuti jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah serta menetapkan agenda dan tatakala pembahasan sehingga target penyelesaiannya dapat tercapai tepat waktu.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

**PEMBAWA ACARA :**

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

**----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----**

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

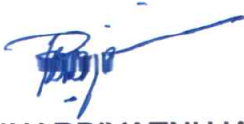
Hadirin yang kami hormati,



Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini.  
Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

Plt. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A, S.I.P.  
NIP. 19710630 199603 1 003





## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

### NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Senin, 19 Mei 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;  
2. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;  
3. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029.

- Waktu Undangan : 12.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 12.30 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

- Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
  2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
  3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
  2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
  3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta
  4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
  5. Wartawan

- Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 33 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
  2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi:
    - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menugaskan Saudara Susanto Dwi Antoro, S.E., urutan ke-1;
    - Fraksi Partai Gerindra, menugaskan Saudara Krisnadi Setyawan, urutan ke-2;
    - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menugaskan Saudara Nurcahyo Nugroho, Urutan ke-3;
    - Fraksi Partai Golkar, menugaskan Saudara Yogo Prasetyo Pihutomo, Urutan ke-4;

- Fraksi Partai Amanat Nasional, menugaskan Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md, urutan ke-5;
  - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menugaskan Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn, urutan ke-6;
  - Fraksi Partai Nasdem, menugaskan Saudara Oleg Yohan, urutan ke-7.
3. Tambahan sisipan orasi dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi Gerindra oleh Saudara Krisnadi Setyawan. Dicatat dalam Risalah.
  4. Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.
  5. Penyampaian penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.
  6. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029 oleh Plt. Sekretaris DPRD.
  7. Pimpinan rapat Paripurna menanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui? Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui.
  8. Pemberian nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029 oleh Plt. Sekretaris DPRD, diberi Nomor 13/KEP/DPRD/V/2025.
  9. Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 13/KEP/DPRD/V/2025.
  10. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat  
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 14 Mei 2025

Nomor : 100.1.4.4 /654  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 19 Mei 2025  
Pukul : 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta  
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;  
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  
3. Pembentukan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN







**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦗꦿꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦂꦶꦠꦢꦫꦶꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

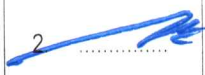

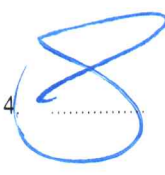


EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.setwan.jogjakota.go.id](http://www.setwan.jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

- Hari : Senin  
Tanggal : 19 Mei 2025  
Waktu : 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;  
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  
3. Pembentukan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

No	Nama		Tanda Tangan	Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	1. ....	
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA	2. 	
3.	Arif S.	KODIM 0734	3. 	
4.	Aditya	POLRESTA	4. 	
5.	Andana G.	PENGADILAN NEGERI	5. 	
6.	yogie R. SH. MH.	KEJAKSAAN NEGERI	6. 	







**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ  
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.setwan.jogjakota.go.id](http://www.setwan.jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

- Hari : Senin  
 Tanggal : 19 Mei 2025  
 Waktu : 12.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
 Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;  
 2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  
 3. Pembentukan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

**EKSEKUTIF**

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Budi Asoni	IV	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
2.	Emma		Dinas Kesehatan		
3.	Emma Susanti		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4.	Lucia Dany Kristanti		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		
5.			Satuan Polisi Pamong Praja		
6.	Indrawati		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
7.			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.	Ira R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
9.	Galuh		Dinas Perdagangan		
10.	Ary Iyawan	u	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
11.	LSMA	u	Dinas Pertanian dan Pangan		
12.	Very Tri Jatmiko		Dinas Lingkungan Hidup		
13.	Edy Suphant		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		
14.	Chuhanto		Dinas Perhubungan		
15.	Afa R		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
16.	Tari Sotya A		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
17.	Mutiara		Dinas Pariwisata Tipe A		
18.	Surati Rini		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
19.	Ara Dika		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		



# **PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PDI PERJUANGAN**

Paripurna, 19 Mei 2025

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Salam Sejahtera untuk kita semua**

**Om Swastiastu**

**Salam Kebajikan**

**Rahayu**

**Merdeka !!!**

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah dan segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

**Rapat Dewan Yang Terhormat,**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhana Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum atas :

**PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,**

Perkenankan kami membacakan Pemandangan Umum sebagai berikut :

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik,

pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Progress report atas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta.

Keuangan daerah merupakan pondasi bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar, pemanfaatan kerangka hukum yang ada, dan mengatasi tantangan melalui inovasi, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Keberhasilan keuangan daerah juga sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Penerapan system elektronik untuk meningkatkan efisiensi (digitalisasi keuangan), melibatkan swasta dalam proyek pembangunan melalui skema publik (kemitraan), pengembangan sumber-sumber pendapatan baru, seperti pariwisata, ekonomi kreatif dan pajak berbasis digital (diversifikasi pendapatan), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi anggaran, sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengawas utama pelaksanaannya. Transparansi, akuntabilitas dan inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap system pemerintah daerah.

**Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,**

Setelah membaca dan mencermati secara seksama Pengantar Laporan **Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan**

**Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024** bahwa Laporan Keuangan yang disajikan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VIII Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : **2A/LHP/XVIII.YOG/04/2025 tanggal 14 April 2025.**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menyajikan **secara Wajar**, dalam semua hal yang material, bahwa Posisi Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2024 dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

#### **Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati**

Setelah memami **Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024** dan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta aturan-aturan yang berlaku, dengan demikian dari Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang**

**Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.**

**Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati**

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan.

Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Sekian**, *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Salam Sejahtera untuk kita semua**

**Om Swastiastu**

**Salam Kebajikan**

**Rahayu**

**Yogyakarta, 19 Mei 2025**

**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**

Ketua



**Darini, S.IP**

Sekretaris



**Ipung Purwandari, SH**



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota**

**Yogyakarta Hari / Tanggal: 19 Mei 2025**

Atas

**Penyampaian**

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

***Yang Terhormat***

Sdr. Pimpinan Sidang

***Yang Kami Hormati***

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

***Yang Kami Hormati***

Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Saudara-saudara Anggota Forkopimda Kota Yogyakarta

Rekan-rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini.

**Para Hadirin Yang Terhormat**

Mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 terbilang besar, yakni sejumlah Rp (200.661.254.733,01). Walau bila dibandingkan tahun sebelumnya SiLPA berkurang sebanyak 27,14%, anggaran tersebut semestinya dapat direalisasikan untuk program-program pelayanan masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selisih lebih anggaran yang berkaitan dengan urusan dasar seperti pendidikan yang berjumlah Rp20.959.527.323,00 dan kesehatan Rp24.122.088.516,00. Program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut seharusnya direalisasikan secara efektif dan optimal dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Hal tersebut penting karena urusan dasar berkaitan dengan kebutuhan utama atau pelayanan masyarakat.
2. Realisasi belanja APBD tahun 2024 yakni sebesar Rp2.091.367.191.908,80 (Dua triliun sembilan puluh satu milliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah delapan puluh sen). Namun, dengan anggaran sebesar itu masih terdapat banyak permasalahan krusial di Kota Yogyakarta hingga saat ini yang belum terselesaikan, seperti halnya masalah pengelolaan sampah. Anggaran sebesar Rp9.130.100.000,00 yang dapat direalisasikan dinas terkait belum menjadi jawaban konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi program-program yang tidak memberi dampak baik



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Yogyakarta harus menjadi fokus perbaikan.

3. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yakni sebesar Rp76.242.064.340,00. Pengupayaan optimalisasi retribusi daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi telah secara baik dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga realisasi retribusi daerah Kota Yogyakarta TA 2024 sebesar 112,30% dari target. Hal tersebut perlu dipertahankan pada realisasi tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan 18 jenis retribusi daerah Kota Yogyakarta.
4. Melalui data target dan realisasi kinerja pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 terlihat bahwa indeks pengembangan infrastruktur wilayah yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat pembangunan infrastruktur di suatu wilayah belum tercapai secara optimal. Menurut hasil perhitungan RAPPFDA capaian indeks pengembangan struktur wilayah Kota Yogyakarta, yakni senilai 95,96 %. Realisasi kinerja dalam hal tersebut perlu ditingkatkan, utamanya untuk pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat atau pembangunan ruang ekonomi yang saat ini semakin sedikit. Pembangunan infrastruktur guna menunjang kebutuhan masyarakat tersebut penting direalisasikan untuk mengatasi permasalahan penataan atau relokasi di beberapa wilayah Kota Yogyakarta.

Terlepas dari beberapa kekurangan, kami mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Kota Yogyakarta 2024. Semoga selanjutnya pemerintah Kota Yogyakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara amanah, agar Kota yang kita cintai ini dapat lebih berkembang dan masyarakatnya sejahtera.



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0271) 510650 Faks (0271) 510651

Demikian Pandangan Umum kami Fraksi Gerindra, jika ada kata kurang berkenan dari beberapa hal yang kami haturkan, mohon dimaafkan.

Saudara Pimpinan dan Rapat Dewan beserta Walikota atau Wakil Walikota yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Sekian,  
**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 19 Mei 2025  
Hormat Kami,

**Ketua Fraksi**

Dhian Novitasari, S.Pd

**FRAKSI GERINDRA  
DPRD**



**Sekretaris Fraksi**

Ririk Banowati Permanasari, SH

**Pemandangan Umum**  
**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Terhadap**  
**Rancangan Peraturan Daerah**  
**Tentang**  
**Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang**

## **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024**

Saudara Walikota, Saudara Pimpinan, hadirin yang berbahagia, Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi PKS ini, adalah dalam rangka bagian dari tanggungjawab dan fungsi DPRD untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sekaligus dalam rangka menjalankan fungsi *checks and balances*.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pasal 5: Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah terdiri atas:

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- E. Neraca
- F. Laporan Arus Kas
- G. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kelima aspek diatas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra.

Penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra didasarkan pada indikator :

1. Dampak: bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan
2. Manfaat: bagaimana tingkat pemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai untuk masyarakat, maupun pemerintah

3. Hasil: bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan
4. Keluaran: bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan
5. Masukan: bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, waktu, teknologi dan sebagainya.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibandingkan dengan Renstra dan Target yang telah ditetapkan di Tahun anggaran 2024. Harapan kami penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya mengejar target normatif atau target berupa besaran angka saja, tetapi juga harus mengukur seberapa besar dampak dan juga kebermanfaatannya yang diperoleh masyarakat, karena pada dasarnya yang merasakan dan menikmati keberhasilan program dan pelaksanaan APBD adalah masyarakat.

*Sidang Paripurna yang berbahagia,*

Kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 mengatur bahwa APBD harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas opini wajar dalam semua hal yang material, Posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2024 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, Arus Kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan pada Kota Yogyakarta selama enam belas tahun berturut-turut tentu harus diapresiasi.

Berikut beberapa catatan kami terhadap dokumen rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024:

### **Pendapatan Daerah,**

*Saudara Walikota yang saya hormati,*

Sekali lagi Fraksi PKS Kota Yogyakarta memberikan apresiasi atas Meningkatnya Perolehan Pendapatan Daerah tahun 2024 setelah sempat menurun pada tahun 2020, Perolehan Pendapatan tahun 2024 mencapai 2.081.580.284.914,30 ( dua trilyun delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen ), Angka pendapatan daerah ini meningkat dari tahun 2023 yang sejumlah 2.000.846.169.483,53 ( dua trilyun delapan ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen )

Secara khusus Fraksi PKS Kota Yogyakarta juga memahami bahwa dinamika yang terjadi pada enam tahun terakhir berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah. Sebagai catatan, untuk tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 563.174.371.396,88 (lima ratus enam puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) atau menurun 18,27 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019 yang mencapai Rp 689.049.725.509,27 (enam ratus delapan puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua puluh tujuh sen), Kondisi di tahun anggaran 2021 sudah mulai membaik dengan meningkatnya kembali PAD sebesar 5,53 % dengan realisasi sejumlah Rp 598.121.885.337,87 ( Lima ratus Sembilan puluh delapan milyar seratus duapuluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen ) dan pada masa *recovery* pasca pandemi yaitu tahun anggaran 2022 PAD sudah meningkat dari kondisi sebelum pandemi yaitu dengan realisasi sejumlah Rp 725.577.542.997, 58 ( Tujuh ratus Dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen ) yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp 805.346.115.792, 53 ( Delapan ratus lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh tiga sen), dimana peningkatan realisasi pendapatan kurang dari peningkatan pendapatan di tahun sebelumnya, dan kondisi tersebut

terulang kembali di tahun 2024 dimana terdapat peningkatan PAD namun kurang signifikan, karena jumlah PAD tahun 2024 yang terealisasi hanya mencapai Rp 855.100.858.914,30 (Delapan ratus lima puluh lima milyar tiga seratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen).

Fraksi PKS mengharapkan ada solusi dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dengan menjadikan peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pencapaian kerja Pemerintah Kota Yogyakarta juga merupakan sebuah bentuk komitmen untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan mendorong semakin banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Selanjutnya Kami tetap mendukung eksekutif terus memperbaharui penghitungan dan pengkajian atas potensi pendapatan Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh team independen. Sehingga kita mengetahui berapa potensi pendapatan yang sebenarnya. Harapannya potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan dapat menghindari kebocoran.

#### **Belanja Daerah,**

*Saudara Walikota yang saya hormati,*

Fraksi PKS mengapresiasi realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp2.091.367.191.908,80 (dua trilyun sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus Sembilan ratus delapan rupiah delapan puluh sen) atau sebesar 94,07% dari anggaran yang meningkat dari jumlah belanja tahun 2023 yang mencapai Rp1.972.232.487.691,95 (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen) atau sebesar 92,23% dari anggaran, Fraksi PKS berharap kedepannya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan realisasi belanja daerah, karena pada dasarnya realisasi belanja daerah harus dimaksimalkan dan diarahkan pada belanja urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang baik.

## **Retribusi Daerah,**

*Saudara Walikota yang saya hormati,*

Fraksi PKS mengapresiasi terkait Perolehan Retribusi Daerah tahun anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp 76.242.064.340,00 (tujuh puluh enam milyar dua ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 112,30% dari target, meningkat dua kali lipat dibanding perolehan retribusi tahun 2023 yang ada di angka Rp 29.669.773.143,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota dapat menjaga peningkatan perolehan retribusi dengan melakukan optimalisasi Retribusi Daerah yang telah diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

*Sidang Paripurna yang berbahagia,*

Kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan ini menjadi pelajaran untuk kedepannya. terutama terkait dengan besarnya SILPA Tahun 2024 yang mencapai Rp. 200.661.254.733,01 ( dua ratus milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen). Fraksi PKS secara tegas menyatakan bahwa SILPA yang besar adalah suatu hal yang merugikan masyarakat, karena hal tersebut menandakan bahwa pembangunan tidak terlaksana secara maksimal, ditengah kondisi saat ini lebih bijak jika realisasi serapan anggaran kegiatan dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah sampah.

Fraksi PKS mendorong untuk beberapa hal perlu menjadi kesepakatan bersama :

1. Realisasi belanja daerah harus dimaksimalkan dan diarahkan pada belanja urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang baik.
2. Menata ulang skala prioritas belanja daerah dengan mempertumbangkan prinsip asas kebermanfaatn bagi masyarakat, utamanya menyelesaikan permasalahan yang mendesak seperti permasalahan pengelolaan sampah.

3. Meningkatkan efektifitas kinerja aparatur pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur daerah.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan di hati.

Terimakasih atas perhatiannya

*Wassalamualaikum wr.wb*

### Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.

Ketua



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

---

*Disampaikan pada :*

Hari : Senin  
Tanggal : 19 Mei 2025  
Jam : 12.00 WIB  
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

---

---

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

***Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;

Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2024 pada paripurna yang lalu.

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya serapan anggaran secara efektif yang didasarkan pada perencanaan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang di asumsikan secara terukur selama kurun waktu 1 tahun.

Secara yuridis formal, Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 mengacu pada Standar Akutansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan demikian, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diterapkan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang direncanakan untuk pengoptimalkan pencapaian beberapa target pembangunan yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan, dengan fokus prioritas tetap pada pemulihan dan pembangunan ekonomi, melalui proses perubahan anggaran diperlukan pencermatan kembali

terhadap pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah sehingga diharapkan terdapat ruang untuk membangun pondasi pemulihan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 5 ( lima ) alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perubahan APBD didasarkan pada; (1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3). Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun lalu yang harus digunakan pada tahun berjalan; (4). Keadaan Darurat; dan (5). Keadaan Luar Biasa.

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anggaran agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

#### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Setelah mencermati Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 dari Saudara Penjabat Walikota , maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp 2.081.580.284.914,30 (*dua triliun delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen* ) atau 103,42 % dari anggaran, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja besar eksekutif mengingat keadaan ekonomi yang belum pulih akibat pandemi dengan harapan agar senantiasa

terus di tingkatkan, namun dari hasil pendapatan tersebut mestinya masih dapat dimaksimalkan sesuai potensi pajak belum optimalnya pendataan wajib pajak dan wajib retribusi. Hal ini tentunya dalam upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dengan pengoptimalan dalam penagihan.

2. Pajak Daerah yang terdiri dari 10 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp 575.887.653.496,00 ( *lima ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah* ) atau sebesar 108,25% dari target. Realisasi Pajak Daerah tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 67,35%. Dengan demikian, bahwa terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya, ini tentu saja masih dapat dimaksimalkan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat setiap tahunnya.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum mengalami penurunan di banding tahun yang lalu, pemerintah dirasa perlu memperkuat Sistem Administrasi untuk menambal kebocoran pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum. Perencanaan peningkatan kapasitas penerimaan retribusi parkir, dengan melakukan survei lokasi sehingga target yang ditetapkan sesuai dengan realitas di lapangan.
4. Pemerintah Kota diharapkan memfasilitasi para pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi, memberikan pendampingan secara bertahap, serta mendekatkan pada lembaga keuangan dalam membantu modal.
5. Pemerintah Kota diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak terkait untuk mewujudkan penghapusan sanksi denda yang berlaku mulai tanggal 18 Mei 2022 ini, agar dapat berpengaruh signifikan terhadap

retribusi daerah sehingga dapat terpenuhinya target retribusi pengujian kendaraan bermotor.

6. Terkait dengan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 oleh BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, opini laporan Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan **wajar** dalam semua hal yang material, tentunya perlu mendapat apresiasi namun tidak lupa perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan berupaya terus meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap program kegiatan.

**Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

*Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.*

*Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,*

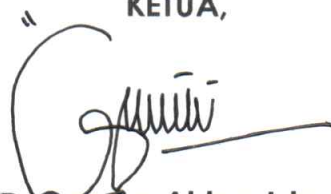
**Wabillahi Taufik Wal Hidayah,**

**Wassalamualaikum wr, wb.**

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**KETUA,**



**R. Candra Akbar Ishmata, S.H**



**SEKRETARIS,**



**Yogo Prasetyo Pri Hutomo**



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta,

**Pada Hari : Senin  
Tanggal : 19 Mei 2025  
Juru Bicara : Tri Waluko Widodo**

***Assalamu 'alaikum Wr. Wb.***

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah serta segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **Sidang Paripurna yang kami hormati**

Kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini yang terkandung dalam APBD harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024, maka **Fraksi PAN mengapresiasi** kinerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang mendapat pengakuan dari BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke enam belas kalinya, **namun secara umum F - PAN berharap**

**Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memastikan melaksanakan rekomendasi BPK:**

- **Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI):** Memastikan mekanisme pengawasan dan pengelolaan risiko yang lebih efektif.
- **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:** Memastikan semua transaksi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- **Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran:** Memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan.
- **Penatausahaan Aset dan Persediaan:** Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan aset daerah.
- **Kelemahan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa:** Memastikan proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**Angka capaian kinerja penurunan kemiskinan sebesar 0,23% belum maksimal di tahun 2024** , kami mohon Pemerintah Kota Yogyakarta bisa memperbaikinya supaya lebih baik.

Beberapa catatan dari F- PAN terkait **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024** sebagai berikut :

1. Realisasi pajak daerah pada PAD Rp 575,8 M → 108,25 % dari Target, Perlu ada penetapan PAD yang lebih besar mengingat banyak potensi potensi sektor Pajak tahun 2024 diatas target, artinya target potensi pendapatan masih rendah , mestinya setiap tahun paling tidak dinaikkan pada angka 10% ,

2. Khusus retribusi sampah tata kelola harus diperbaiki lagi ,tidak hanya fokus pada peningkatan PAD, kemudian akar permasalahan sampah di hulu mesti di selesaikan lewat pembentukan Satgas atau Relawan Sampah di Tingkat RW/Kampung sehingga persoalan sampah bisa selesai secara tuntas,permasalahan sampah saat ini menjadi prioritas tinggi dan harus dituntaskan di 2025 ini oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya

a) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan harus dikuatkan, dengan memilih Management yang kompeten pada BUMD sehingga meningkatkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah,Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus mendorong kinerja management agar kontribusi terhadap PAD semakin meningkat (Rp 31.8 M atau 98.75 % dari target di tahun 2024 ) seperti yang dijelaskan yang kami hormati Walikota baru menyumbang 3,72 % dari PAD.

b) F- PAN menyampaikan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 200.6 M merupakan angka yang masih cukup besar, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam mengelola keuangan, baik melalui peningkatan pendapatan atau efisiensi pengeluaran.namun bisa juga akibat senggangan anggaran (budgetary slack) baik di sisi pendapatan maupun belanja. sehingga menjadi pertanyaan terkait perencanaan penganggaran yang lebih matang dan profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c) Khususnya retribusi Parkir mestinya menjadi potensi PAD. diperlukan peningkatan pengawasan dan penerbitan agar pemasukan retribusi lebih maksimal ,kinerja instansi harus

penyakit menular di kota. Selain itu, hingga Oktober 2024, tercatat 238 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan kasus DBD ini menjadi perhatian kesehatan masyarakat lainnya di kota. Data dari tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa kasus gangguan kesehatan jiwa di Kota Yogyakarta lebih banyak ditemukan pada laki-laki usia 20-44 tahun dan di atas 45 tahun, sementara pada perempuan lebih banyak pada kelompok usia di atas 45 tahun. Meskipun data ini tidak spesifik untuk tahun 2024, memberikan gambaran mengenai distribusi masalah kesehatan jiwa di kota.

Akhirnya kami mohon maaf, apabila dalam kami menyampaikan Pemandangan Umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.

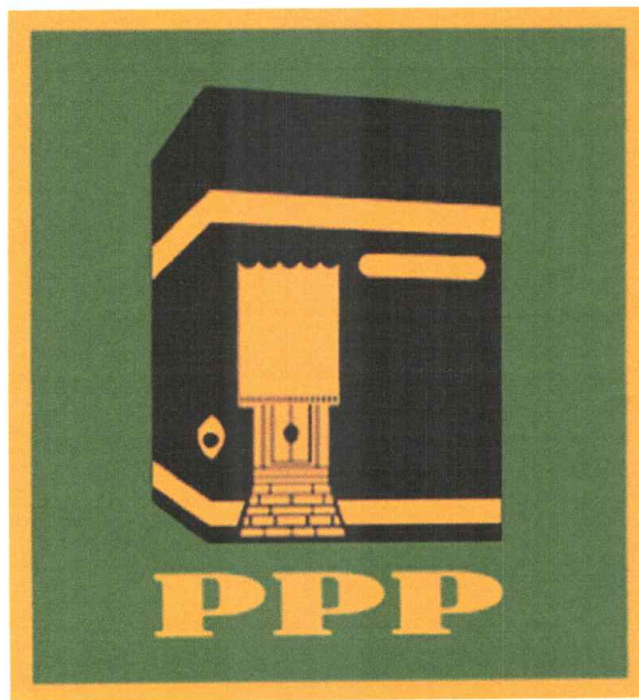
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**Muhammad Sofyan.ST**  
KETUA

**Indaruwanto Eko C**  
SEKRETARIS

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(PPP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2025**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA  
19 MEI 2025**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**PENJELASAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**

**TANUN ANGGARAN 2024**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Senin, 19 Mei 2025

Pukul : 12.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan

Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati.

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta.

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama mencermati dan memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bapak Walikota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memberikan apresiasi atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini. Dokumen ini merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari pentingnya APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Setelah mencermati secara seksama dokumen yang disampaikan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan beberapa pandangan umum dan masukan konstruktif sebagai berikut:

#### 1. Realisasi Pendapatan Daerah:

Kami mencatat realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.081.580.284.914,30 ( dua triliun delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau mencapai 103,42% dari anggaran. Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Namun demikian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk terus menggali potensi pendapatan

daerah lainnya secara inovatif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.

Kami juga menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 855.100.858.914,30 (delapan ratus lima puluh lima miliar seratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau 109,48% dari target.

Kontribusi terbesar PAD masih didominasi oleh Pajak Daerah, terutama Pajak Hotel/PBJT-Jasa Perhotelan, Pajak Restoran/PBJT-Makanan dan/atau Minuman, dan Pajak Penerangan Jalan/PBJT-Tenaga Listrik. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong diversifikasi sumber-sumber PAD agar Kota Yogyakarta tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu dan lebih tahan terhadap perubahan ekonomi. Optimalisasi retribusi daerah juga perlu terus ditingkatkan dengan memperhatikan kualitas pelayanan publik.

## 2. Realisasi Belanja Daerah:

Realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp2.091.367.191.908,80 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah delapan pulun sen) atau 94,07% dari anggaran.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan belanja daerah. Penyerapan anggaran yang optimal dan tepat sasaran akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Kami juga mencermati adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 200.661.254.733,01 (dua ratus miliar enam ratus enam

puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sat(sen)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap sisa lebih ini dapat dialokasikan secara Prioritas pada program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

### 3. Pengelolaan Keuangan Daerah:

Fraksi P3 mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, kami mengingatkan agar rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan.

### 4. Ekuitas dan Aset Daerah:

Kami mencatat peningkatan nilai Ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp5.954.565.697.597,40 (lima triliun Sembilan ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah empat puluh sen)

Pengelolaan aset daerah yang baik dan optimal juga menjadi perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3). Kami mendorong Pemerintah Kota untuk terus melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Berdasarkan pandangan umum di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan beberapa masukan konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang:

a) **Penguatan Sektor UMKM:**

Mengingat kontribusi signifikan sektor UMKM terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, Fraksi P3 mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, termasuk akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran.

b) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur dasar.

c) **Fokus pada Program Prioritas :**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk lebih fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memastikan alokasi anggaran yang efektif untuk mencapai target-target pembangunan.

d) **Transparansi dan Partisipasi Publik :**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD.

Demikian pandangan umum dan masukan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Kami berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota dan seluruh anggota dewan dalam menetapkan peraturan daerah yang akan menjadi landasan penting bagi pembangunan Kota Yogyakarta yang lebih baik dan berkeadilan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Terima kasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2025


Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua

  
The official stamp is circular with a green border. Inside the border, the text "FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN" is written at the top and "KOTA YOGYAKARTA" at the bottom. In the center, there is a black and white logo of a building with the letters "PPP" below it.

H. SETYAJI HERMAWAN

Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
19 Mei 2025**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Assalammu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.**

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan  
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota  
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang  
berbahagia.**

**Salam Restorasi Indonesia.**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan

pendapat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan dua minggu lalu.

**Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, Pemerintah Daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama satu tahun. APBD harus pro rakyat, yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Selanjutnya penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 harapannya dapat memberikan dampak besar terhadap masyarakat Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Mendagri pernah menyampaikan himbauan pentingnya melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat. Waktu yang tepat tahapan evaluasi dilaksanakan adalah ketika anggaran sudah diperbelanjakannya. Laporan pertanggungjawaban pihak eksekutif sebagai pengguna

anggaran harus dilaksanakan setiap akhir tahun yang merupakan perwujudan dari kewajiban Undang-undang. Selanjutnya ada mekanisme yang harus dijalankan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

### **Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

Menanggapi Nota Pengantar Walikota Yogyakarta Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kota Yogyakarta. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sudah melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan tahapan sesuai prosedur yang ada, yaitu melakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya, Posisi Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2024 dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Kami mengapresiasi hasil audit sudah sesuai standar aturan pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam hasil pemeriksaan

Nomor **2A/LHP/XVIII.YOG/04/2025** tanggal 14 april 2025 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kota Yogyakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan juga sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.
4. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 2.081.580.284.914,30 (dua triliun delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau 103,42 % dari anggaran. Sedangkan Rancangan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.005.807.489.721,- (dua triliun lima miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Kami mengapresiasi adanya pendapatan yang melebihi target dari anggaran yang telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

**Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

5. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 855.100.858.914,30 (delapan ratus

lima puluh lima miliar seratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau sebesar 109,48% dari target. Kami cukup mengapresiasi perolehan PAD tahun 2024 melebihi target dari yang telah direncanakan, dan juga adanya peningkatan PAD dari tahun sebelumnya, di mana PAD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 805.346.115.792,53 (delapan ratus lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh tiga sen). Namun, tetap perlu adanya peningkatan ke depannya hingga kontribusi PAD bisa menyentuh angka 50% dari Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, Kami Fraksi Partai NasDem terus mendorong harapan kita bersama bahwa PAD Kota Yogyakarta **Satu Triliun** bisa terealisasi dalam waktu dekat dengan modal kerjasama semua *stakeholder* dan memaksimalkan seluruh aset serta potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta.

6. Kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta memberikan apresiasi terhadap realisasi PAD sektor pajak sebesar Rp.575.887.653.496,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 108,25% dari target. Sehingga realisasi Pajak Daerah tersebut memberikan **kontribusi terbesar terhadap PAD, yaitu sebesar 67,35%**. Namun, Kami tetap memberikan catatan pendapatan pada sektor ini harus terus dimaksimalkan, seiring bertambahnya wajib pajak, dan meningkatnya pembangunan gedung hotel, tempat usaha, dan tempat wisata di Kota Yogyakarta.
7. Ada banyak potensi dan strategi upaya meningkatkan pendapatan

sektor pajak daerah seiring meningkatnya pembangunan di Kota Yogyakarta. Adanya pemerintahan baru Kota Yogyakarta atas pergantian lima tahunan, tentunya ada pola dan sistem pemerintah yang berbeda, maka kami bertanya apa langkah strategis pemerintah sekarang dalam upaya meningkatkan PAD sektor pajak daerah?

**Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

8. Realisasi sektor Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 memperoleh sebesar Rp. 76.242.064.340,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 112,30% dari target. Kami memberikan masukan agar Pemkot Yogyakarta bisa meningkatkan PAD dari sektor retribusi, melihat banyaknya potensi Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan retribusi. Sekaligus kami bertanya bagaimana langkah Pemkot Yogyakarta untuk meningkatkan sektor ini? Namun, kami tetap memberikan apresiasi karena mayoritas sektor retribusi daerah melebihi target.
9. Realisasi Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 31.847.065.857,26 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen) atau sebesar 98,57% dari target. Kami memberikan masukan pada sektor ini agar pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah bisa ditingkatkan lagi manajemen pengelolaannya sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan sektor ini pada Tahun Anggaran 2023 menyentuh angka 32.830.241.608,86 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat

puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh enam sen), seharusnya ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

10. Sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 171.124.075.221,04 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah empat sen) atau sebesar 114,96% dari target. Sektor ini bisa memberikan hingga 20,01% pada PAD tahun anggaran 2024. Kami Fraksi Partai NasDem menghimbau ke depan agar Pemkot Yogyakarta memaksimalkan pengawasan terhadap instansi-instansi terkait untuk sumbangsi Sumber Lain-lain yang Sah berkontribusi terhadap APBD 2025 bisa ditingkatkan lagi.
11. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.64.967.000.000,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Besarnya penyertaan modal, Kami Fraksi Partai NasDem mengusulkan pada Pemkot Yogyakarta harus diikuti pengawasan yang maksimal sehingga distribusi keuangan tersebut secara merata, selanjutnya banyak membuka peluang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan Nya. Ada kurang dan lebihnya

dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 19 Mei 2025

**Fraksi Partai NasDem  
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



**Sigit Wicaksono, S. Kom**

Sekretaris



Dewan Pimpinan Daerah  
**Partai Nasdem**  
Kota Yogyakarta

**Oleg Yohan**



**WALI KOTA YOGYAKARTA**

*ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦪꦒꦿꦏꦂꦠ*

**PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban untuk menindaklanjuti segera penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD yang di dalamnya sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dimulai sejak dilantikannya Wali Kota terpilih pada 20 Februari 2025 dan harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan wali Kota terpilih, yakni pada tanggal 20 Agustus 2025 mendatang. Apabila Pemerintah Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dimulai dari penyelenggaraan Konsultasi Publik, Konsultasi dengan DPRD dan DIY, Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai arah pembangunan selama 5 tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini telah berpedoman pada RPJPD, RPJMN Nasional maupun RPJMD DIY serta dokumen lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD ini adalah:

1. Memberikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan pada jangka waktu 2025 – 2029.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMD.
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu indikatif, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga perumusan indikator untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Wali Kota

dan Wakil Wali Kota selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.

Dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah ini, tercantum bahwa Visi Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Adil Makmur menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang berkeadilan, di mana pemerataan akses terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen yang saling mendukung. Pembangunan yang lestari mengacu pada upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Kota yang berkeadaban menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi Pembangunan sebagai dasar pembangunan dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. "Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan".
2. "Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari".
3. "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal".
4. "Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945".
5. "Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY".

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah merumuskan 8 (delapan) program strategis meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
  - a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana;
  - b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian; dan
  - c. Penumbuhan Wirausaha Muda.
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
  - a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat;
  - b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
  - c. Satu Kampung Satu Bidan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
  - a. Bela Beli Produk Warga;
  - b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
  - c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
  - a. Revitalisasi Kampung Wisata
  - b. Ekonomi Olahraga; dan
  - c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
  - a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
  - b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
  - c. Perlindungan Hukum bagi Warga.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan:
  - a. Bapak Asuh Keluarga Miskin;
  - b. Kampung Layak Huni; dan
  - c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan.
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
  - a. Memperkuat kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan;
  - b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan Masyarakat;
  - c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan;
  - d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan; dan
  - e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
  - a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah;
  - b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan; dan
  - c. Jogja Tangguh Bencana.

Dengan Visi, Misi dan Program Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. Kerjasama seluruh stakeholder pembangunan sangat kami harapkan demi terwujudnya masyarakat Kota Yogyakarta yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban.

Demikianlah Penjelasan kami atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Penjelasan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 13/KEP/DPRD/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum mendapat Nota Persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22/F.Gerindra/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15/K-PKS/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/V/2025, tanggal 16 Mei 2025, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PPP/JOG/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 018/F-PDIP/V/2025, tanggal 16 Mei 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/V/2025 dan Nomor 04/FP-NasDem/DPRDKotaYka/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 063/FPG-KOTA/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025 - 2029.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025 - 2029;
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Mei 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA 2025-2029

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA 2025-2029

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Ketua/Anggota	PDI-P
2	Dhian Novitasari, S.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
5	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
6	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	PARTAI GOLKAR
7	Yogo Prasetya Pri Hutomo	Anggota	PARTAI GOLKAR
8	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
9	Muhammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
10	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

  
RM. SINARBIYATNUJANAT



**2025**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**

